



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**  
**MANAJEMEN (S-1) TERAKREDITASI BAN-PT**  
**MAGISTER MANAJEMEN (S-2) TERAKREDITASI BAN-PT**

Kampus I : Gedung Dewi Sartika Lt.3, Jl. Tebet Barat Dalam VI No. 39-41 Tebet, Jakarta 12810

Telp. (021) 837-89666 Fax. (021) 837-89627

Kampus II : Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Nagrak, Gn. Putri, Bogor 16967

Telp. (021) 823-3737 Fax. (021) 823-4224

HTTP://website : www.stieipwija.ac.id Email : contact@stieipwija.ac.id

**PERPUSTAKAAN STIE IPWIJA**

**SURAT KETERANGAN**

No.28.Q/PUSTA/STIEIPWIJA/XI/020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Imam Muslim

Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan

Instansi : STIE IPWIJA

Menerangkan bahwa **Karya Ilmiah** tersebut di bawah ini :

Judul : ***Pengaruh Dimensi Pemerintah Sebagai Variabel Intervening Antara Edukasi  
Keuangan Terhadap Pemberdayaan UMKM***

Penulis : 1. Karisa Zeisha Sahela 2. Riana Susanti 3. Askardiya Radmoyo Adji

No.Katalog : ***338.45/ZEIP – 33815ZEIP***

Telah Perpustakaan STIE IPWIJA terima untuk dipergunakan bagi kalangan mahasiswa dan umum.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 28 November 2020



**Mochamad Imam Muslim**  
Ka.Perpustakaan

cc. 2 lembar, Arsip

**PENGARUH DIMENSI PEMERINTAH SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING ANTARA EDUKASI  
KEUANGAN TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**



Oleh:

**KARISA ZEISHA SAHELA**

**RIANA SUSANTI**  
NIDN : 0311017304

**ASKARDIYA RADMOYO ADJIE**  
NIDN : 0322106702

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWIJA  
PROGRAM SARJANA MANAJEMEN  
JAKARTA  
2020**

**HASIL PENELITIAN DOSEN  
PROGRAM STRATA DUA MANAJEMEN  
STIE IPWIJA**

Judul Penelitian : **PENGARUH DIMENSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING ANTARA EDUKASI KEUANGAN TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM**

1. Peneliti

a) Peneliti 1

Nama Lengkap : Karisa Zeisha Sahela  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : PhD. Candidate  
Univ/Inst/Akademi/Sekolah : Lincoln University College, Malaysia  
Bidang Ilmu Yang Diteliti : Kewirausahaan

b) Peneliti 2

Nama Lengkap : Riana Susanti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pangkat/Gol/NIP : 3C  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Nomor Induk Dosen : 0311017304  
Univ/Inst/Akademi/Sekolah : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta  
Bidang Ilmu Yang Diteliti : Kewirausahaan

b) Peneliti 3

Nama Lengkap : Askardiya Radmoyo Adji  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pangkat/Gol/NIP : 3C  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Nomor Induk Dosen : 0322106702  
Univ/Inst/Akademi/Sekolah : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta  
Bidang Ilmu Yang Diteliti : Kewirausahaan

2. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga)
3. Lokasi Penelitian : Jakarta
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
5. Biaya : 6 juta

Jakarta, 25 November 2020

Menyetujui,

Peneliti



**Eka Avianti Ayuningtyas, SE, MBA**

PLT Kepala LP2M

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Zeisha'.

**1. Karisa Zeisha Sahela, S.T., MBA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Susanti'.

**2. Riana Susanti, S.IP., M.Si., DBA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. R. Adjie'.

**3. Askardiya R. Adjie, S.T., MM., MH., DBA**

# **PENGARUH DIMENSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING ANTARA EDUKASI KEUANGAN TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM**

Oleh:

**Karisa Zeisha Sahela**  
**Lincoln University College**  
karisazeisha08@gmail.com

**Riana Susanti**  
**STIE IPWI Jakarta**  
santihoesodo@gmail.com

**Askardiya Radmoyo Adjie**  
**STIE IPWI Jakarta**  
ahoesodo@gmail.com

## **ABSTRAK**

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh lima pilar pembiayaan inklusif terhadap pemberdayaan UMKM dan pengaruh kondisi kelembagaan terhadap pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagai populasi penelitian. Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Jakarta merupakan populasi yang baik untuk diukur karena mereka merupakan pelaku utama yang mengetahui secara pasti apa saja gangguan dan hambatan dalam menjalankan usaha, berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan inklusif, yang mana terkait dengan tujuan penelitian. Total Usaha Mikro Kecil Menengah / UMKM di Jakarta adalah 930.620 Unit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap upaya pembiayaan UMKM di Indonesia, yang berarti edukasi keuangan memegang peranan penting dalam keberlanjutan keuangan inklusif. Sejalan dengan teori keuangan yang menyatakan bahwa teori yang dikembangkan untuk menjelaskan keuangan pada tingkat perusahaan perlu disesuaikan dengan situasi kewirausahaan, sehingga dapat menjelaskan perilaku usaha kecil. Artinya dengan pengetahuan keuangan yang benar, keuangan inklusif memegang peranan penting dalam keberlangsungan UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: Edukasi Keuangan, Pemberdayaan UMKM, Teori Kewirausahaan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat dan bantuan-Nya, kami dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul **PENGARUH DIMENSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING ANTARA EDUKASI KEUANGAN TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM**

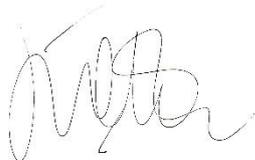
Secara singkat penelitian ini mempelajari Pengaruh Dimensi Pemerintah sebagai Variabel *Intervening* antara Edukasi Keuangan terhadap Pemberdayaan UMKM

Dengan selesainya penelitian ini, besar harapan kami agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak sebagai referensi juga memperkaya penelitian di bidang kewirausahaan, inklusi keuangan dan manajemen ini.

Dalam melakukan penelitian ini, kami telah menerima banyak dukungan dan bantuan. Karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak juga keluarga yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga penelitian ini dapat membawa manfaat baik bagi diri kami sendiri maupun bagi para pembaca. Kritik dan saran sangat kami hargai dan harapkan demi perbaikan penelitian di waktu yang akan datang.

Jakarta, 25 November 2020



Karisa Zeisha Sahela., S.T., MBA



Riana Susanti, M.Si., DBA



Askardiya Radmoyo Adjie, S.T., M.M., M.H., DBA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR .....	5
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR .....	9
PENDAHULUAN .....	10
1.1 Latar Belakang .....	10
1.2 Perumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
II. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis.....	13
2.1. Teori Keuangan.....	13
2.2. Teori Kewirausahaan .....	13
2.3. Teori Keuangan Wirausaha.....	14
2.4. Kerangka Penelitian .....	14
2.5. Hipotesis .....	15
III. METODE PENELITIAN.....	18
3.1. Tempat dan Waktu.....	18
3.2 Desain Penelitian .....	19
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian .....	19
3.4. Definisi Operasional dan Indikator Penelitian.....	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	21
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	21
4.1. Analisis Data.....	21

4.1.1. Evaluasi Model Struktural .....	21
4.1.2. Pengujian Model Keseluruhan .....	22
4.1.3. Pengujian Efek Mediasi .....	23
4.2. Pembahasan.....	25
5. 1 Kesimpulan .....	25
5.2 Saran .....	26
DAFTAR PUSTAKA .....	27

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktural Goodnes of Fit Model .....	21
Tabel 2.	Hasil koefisien jalur dan P-Value .....	22
Tabel 3	Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total .....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Empiris.....	15
Gambar 2 Model Riset Keseluruhan.....	23

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembiayaan inklusif merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas sistem keuangan nasional, terutama jika digunakan untuk memberdayakan UMKM yang berkontribusi besar bagi negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat model implementasi pembiayaan inklusif pemberdayaan UMKM di Indonesia guna menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional.

Kajian ini berfokus pada investigasi lima pilar dalam pemberdayaan UMKM serta kondisi kelembagaan pemberdayaan UMKM. Hasil model implementasi tersebut ditujukan sebagai kerangka kerja untuk mendukung strategi pembiayaan inklusif untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat yang belum menikmati akses jasa keuangan, sehingga dapat menciptakan stabilitas keuangan negara. Suatu strategi yang mengacu pada pendidikan dalam mengelola keuangan. Edukasi ini dimulai dari peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk atau jasa keuangan, baik variasi maupun risikonya. Ini diikuti dengan pengetahuan tentang hak perlindungan pelanggan dan keterampilan manajemen keuangan.

Menurut World Bank (2010), pendidikan keuangan adalah suatu proses dimana pengetahuan keuangan konsumen (investor) tentang berbagai produk keuangan, konsep risiko dan pengembalian, dapat ditingkatkan melalui pemberian informasi, petunjuk, dan nasehat sehingga keterampilan dan kepercayaan diri mereka akan lebih tinggi dalam mengambil keputusan keuangan dengan lebih bijak. Pendidikan keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik tentang lembaga keuangan formal, produk dan layanan keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, dan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Gnan, Silgoner, & Weber (2007) berpendapat bahwa program pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat secara umum tetapi juga penting bagi stabilitas sistem keuangan suatu negara.

Dalam booklet keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (2014) indikator edukasi keuangan meliputi:

- a. Pengetahuan dan kesadaran tentang berbagai produk dan layanan keuangan.

- b. Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan produk keuangan.
- c. Perlindungan pelanggan.
- d. Keterampilan manajemen keuangan.

Karakteristik UMKM adalah sifat faktual yang melekat pada aktivitas bisnis dan perilaku wirausahawan dalam menjalankan usahanya (OECD, 2005). Ciri ini merupakan pembeda pelaku usaha dengan mengikuti skala usahanya.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1. Bisnis Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
- 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
- 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif bisnis, UKM dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. UMKM informal, misalnya PKL.
- b. UMKM Mikro adalah UMKM dengan kemampuan pengrajinnya namun memiliki jiwa kewirausahaan yang kurang untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang memiliki kemampuan berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* adalah kelompok UMKM yang memiliki kemampuan berwirausaha dan siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Di Indonesia, UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah UU No. 20 tahun 2008. Dalam UU ini, UMKM dijabarkan sebagai "R g t w u c j c c p " { c dikategorikan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan kekayaan dan pendapatan tertentu. "(Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia & Bank Indonesia, 2015):

Pemberdayaan UMKM merupakan pilihan strategis karena merupakan cara untuk pulih dari keterpurukan ekonomi dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi pada masa pascakrisis. UMKM dinilai bisa menjadi solusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Menurut Rachman (2016), indikator pemberdayaan UMKM antara lain:

- a. Besarnya pendapatan yang diperoleh UMKM.
- b. Jumlah pekerja yang dimiliki.
- c. Jumlah dan kualitas produk yang dijual atau diproduksi.

Inklusi keuangan penting untuk memastikan inklusi ekonomi karena pembangunan sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memobilisasi tabungan dan investasi di sektor produktif (Jain, A., & Hall, G. 2012) yang didasarkan pada infrastruktur kelembagaan yang dimiliki oleh sistem keuangan; yang berkontribusi pada pengurangan biaya informasi dan transaksi serta secara tidak langsung memungkinkan penurunan kemiskinan, mendorong pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan pendapatan (OECD, 2005). Penelitian ini menyarankan agar pemilik / pengelola UMKM harus meningkatkan kesiapan permodalannya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh edukasi keuangan, dan perlindungan konsumen terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia?
2. Apakah dimensional bank memediasi hubungan antara edukasi keuangan dan jalur distribusi perlindungan konsumen, dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis pengaruh edukasi keuangan dan perlindungan konsumen, dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh dimensional bank dalam memediasi hubungan antara edukasi keuangan dan jalur distribusi perlindungan konsumen, dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

## **II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Teori Keuangan**

Perusahaan korporat memiliki kesamaan dengan perusahaan wirausaha dalam hal jenis keputusan keuangan yang diambil. (Kuratko, 2004) berpendapat bahwa teori yang dikembangkan untuk menjelaskan keuangan pada tingkat perusahaan perlu disesuaikan dengan situasi kewirausahaan, sehingga dapat untuk menjelaskan perilaku perusahaan kecil dan wirausahawannya.

Berikut adalah beberapa aspek penting keuangan perusahaan dari perspektif keuangan kewirausahaan (Kuratko, 2004)

- a. Akses pendanaan masih menjadi kendala utama.
- b. Teori siklus hidup pembiayaan.
- c. Keburaman informasi (keburaman informasi).
- d. Akses ke pendanaan tergantung pada kualifikasi pemberi kerja.
- e. Tidak ada pemisahan yang jelas antara keuangan bisnis dan pribadi.
- f. Masalah tentang kontrol dan kesediaan untuk mengungkapkan informasi.

### **2.2. Teori Kewirausahaan**

(Mitter & Kraus, 2011) menyatakan bahwa topik pendanaan untuk UMKM dapat dikaji dari teori keuangan dan kewirausahaan, artinya bahwa dalam mempelajari aspek pendanaan perlu juga dikaji aspek kewirausahaan.

Teori kewirausahaan pertama kali dikemukakan oleh Schumpeter, yang menyatakan bahwa kewirausahaan adalah proses inovasi yang menghasilkan kreasi baru dalam bisnis, baik itu dalam penciptaan produk, cara, pasar, input, dan organisasi baru (Schumpeter, 1934). Kewirausahaan merupakan katalisator yang menggoyahkan arus perekonomian sehingga mampu menginisiasi dan mendukung proses pembangunan.

Kewirausahaan adalah kegiatan kreatif dan inovatif yang membawa produk atau jasa baru ke dalam kegiatan ekonomi. Schumpeter (1934) menganggap inovasi sebagai alat bagi wirausahawan, sedangkan wirausahawan dipandang sebagai mesin pertumbuhan. David C. McClelland (1965) menyatakan bahwa kewirausahaan memiliki ciri-ciri seperti keberanian menghadapi risiko, adanya energi dan semangat untuk beraktivitas, tanggung jawab, individu, antisipasi peluang masa depan, dan

keterampilan organisasi. David C. McClelland (1965) menemukan korelasi positif antara kebutuhan untuk sukses dan aktivitas kewirausahaan. Orang yang telah menjadi pengusaha rata-rata memiliki tingkat kebutuhan yang lebih tinggi untuk sukses dibandingkan orang lain pada umumnya.

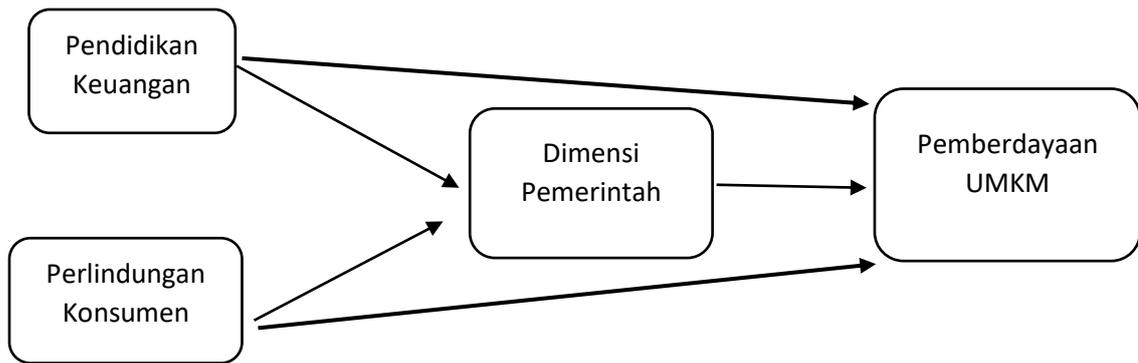
### **2.3. Teori Keuangan Wirausaha**

Teori ini merupakan gabungan antara teori keuangan dan kewirausahaan. (Yazdipour, 2011) menjelaskan keuangan kewirausahaan sebagai teori yang mengkaji sisi keuangan kewirausahaan (sisi keuangan kewirausahaan), teori ini lahir karena teori keuangan perusahaan tidak relevan bagi UMKM. Asumsi yang melekat dalam teori keuangan perusahaan modern tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi usaha kecil. Secara teoritis, perusahaan diasumsikan memiliki akses ke pasar modal eksternal untuk hutang dan ekuitas, padahal UMKM belum tentu memilikinya.

Dalam lingkup analisis dan valuasi investasi, UMKM memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam hal prospek dan arus kas yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan skala besar yang sudah mapan. Kondisi serupa juga terjadi pada pendanaan, dimana UMKM kurang memiliki akses yang luas ke pendanaan eksternal untuk hutang dan ekuitas atau ekuitas. Menurut (Denis, 2004) menyatakan bahwa besarnya tekanan (magnitude) pada agency problem dan asimetris informasi yang dihadapi UMKM lebih besar dari yang dihadapi oleh perusahaan besar atau mapan, sehingga diperlukan solusi kontraktual yang berbeda.

### **2.4. Kerangka Penelitian**

Berdasarkan rumusan hipotesis yang dibangun maka dapat dibuat model penelitian empiris yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Empiris

## 2.5. Hipotesis

### 1. Pengaruh edukasi keuangan terhadap pembiayaan UMKM

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk dan jasa keuangan yang ada di pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman tentang manajemen risiko. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi:

- a) Pengetahuan dan kesadaran tentang berbagai produk dan layanan keuangan,
- b) Pengetahuan dan kesadaran risiko terkait produk keuangan,
- c) Perlindungan nasabah,
- d) Keterampilan manajemen keuangan. Pelaksanaan program pembiayaan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah dan otoritas / regulator.

Inisiatif untuk mendukung pilar tersebut (Bank Indonesia, 2014), antara lain:

- a. Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Merumuskan skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional.
- d. Merumuskan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui bank.

- e. Memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Edukasi keuangan berhubungan positif dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

## **2. Pengaruh perlindungan konsumen terhadap pembiayaan UMKM**

Perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab lembaga keuangan atas kerugian yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan (Shinozaki, 2012). Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan dan memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, kehandalan, kerahasiaan, dan keamanan data / informasi konsumen, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan terjangkau.

Dalam booklet keuangan inklusif yang diterbitkan oleh (Bank Indonesia, 2014), indikator perlindungan konsumen meliputi:

- a. Penerbitan Peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Sistem Pembayaran.
- b. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan di bidangnya masing-masing yang memenuhi prinsip aksesibilitas, kemandirian, keadilan, efisiensi, dan efektivitas serta dipantau oleh regulator.
- c. Menetapkan standar Penyelesaian Sengketa Internal (IDR).
- d. Mengembangkan sistem *Financial Customer Care* (FCC).
- e. Penyediaan jasa konsultasi dan fasilitasi penggunaan produk sistem pembayaran.
- f. Aktivitas Perilaku Pasar.

Hipotesis kedua penelitian ini:

H2: Perlindungan konsumen berhubungan positif dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

### **3. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda di setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan / atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari suatu Badan Usaha Menengah. atau kriteria Usaha Besar untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang mempunyai hasil penjualan bersih atau tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu industri rumahan yang memiliki tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang, usaha kecil memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. orang (Badan Pusat Statistik, 2011)

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki ciri khas antara lain:

- a. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kapabilitas teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya berupa handmade sehingga standar kualitasnya bervariasi.

- b. Desain produk terbatas. Hal ini dipicu oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tentang produk tersebut. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, tidak banyak yang berani mencoba membuat desain baru.
- c. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk. Jika ada permintaan model baru, UMKM sulit dipenuhi. Bahkan jika mereka menerima pesanan, itu akan memakan waktu lama.
- d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan sulitnya menentukan kapasitas dan harga produk membuat konsumen kesulitan.
- e. Bahan baku kurang standar. Karena bahan baku diperoleh dari berbagai sumber.
- f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksinya tidak teratur.

Menurut (Adrian, 2019), salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor adalah dengan meningkatkan pemberdayaan produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah. UMKM dinilai bisa menjadi solusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Hipotesis ketiga, keempat dan kelima penelitian ini:

H3: Dimensi pemerintah dapat memediasi pengaruh pendidikan keuangan terhadap pemberdayaan UMKM.

H4: Dimensi pemerintah dapat memediasi pengaruh perlindungan pelanggan terhadap pemberdayaan UMKM.

H5: Dimensi pemerintah berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat dan Waktu**

Dalam penelitian ini, populasi mengacu pada kumpulan orang yang menjadi fokus penelitian. Isu utama penelitian ini adalah UMKM di Indonesia. Situasi negara mengindikasikan bahwa industri masih terpusat di Jawa karena sebagian besar pengusaha memilih Jawa, khususnya Jakarta, sebagai lokasi yang strategis untuk berinvestasi dan memulai bisnis (Mardanugraha, Anastasya, & Andi, 2015). Oleh

karena itu , penelitian ini dilakukan di Jakarta. Data yang diambil selama pengambilan survey adalah data dari bulan Mei 2020-Oktober 2020.

### **3.2 Desain Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari masing-masing variabel, apakah satu atau lebih variabel yang bersifat independen tanpa membuat hubungan atau perbandingan dengan variabel lain (Sujarweni, 2014)

Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

### **3.3. Populasi dan Sampel Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagai populasi penelitian. Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Jakarta merupakan populasi yang baik untuk diukur karena mereka merupakan pelaku utama yang mengetahui secara pasti apa saja gangguan dan hambatan dalam menjalankan usaha ini mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan inklusif, yang mana terkait dengan tujuan penelitian.

Total Usaha Mikro Kecil Menengah / UMKM di Jakarta adalah 930.620 Unit. Secara umum penelitian yang dilakukan tidak meneliti semua populasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk yang besar, keterbatasan waktu dan biaya. Oleh karena itu peneliti mengambil sebagian dari populasi yang disebut sampel. Menurut (Sugiyono, 2013)) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penting agar sampel dapat mewakili populasi. Berdasarkan jenis dan sumber datanya, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang disajikan.

### **3.4. Definisi Operasional dan Indikator Penelitian**

**Pengukuran untuk variabel independent sebagai berikut:**

#### **1. Pendidikan keuangan**

Indikator:

- a. Pengetahuan dan kesadaran tentang berbagai produk dan layanan keuangan.

- b. Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan produk keuangan.
- c. Perlindungan pelanggan.
- d. Keterampilan manajemen keuangan (Bank Indonesia, 2014).

## **2. Perlindungan Konsumen**

Indikator:

- a. Penerbitan Peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Sistem Pembayaran.
- b. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan di bidangnya masing-masing yang memenuhi prinsip aksesibilitas, kemandirian, kewajaran, efisiensi dan efektivitas serta dipantau oleh regulator.
- c. Menetapkan Sengketa Internal
- d. Penyediaan jasa konsultasi dan fasilitasi penggunaan produk sistem pembayaran. Resolusi (IDR) standar.
- e. Mengembangkan sistem Financial Customer Care (FCC).
- f. Aktivitas Perilaku Pasar (Bank Indonesia, 2014).

**Pengukuran untuk variabel dependen sebagai berikut:**

### **Pemberdayaan UMKM**

Indikator:

- a. Besarnya pendapatan yang diperoleh UMKM.
- b. Jumlah pekerja yang dimiliki
- c. Jumlah dan kualitas produk yang dijual atau diproduksi (Choirunnisa, 2018).

### **Pengukuran untuk Variable Mediasi**

#### **Dimensi pemerintahan**

1. Kebijakan tersebut mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pemerintah menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pemerintah mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional.
4. Pemerintah menyusun mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan.
5. Pemerintah memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan.
6. Pemerintah menyusun kajian terkait pembiayaan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : melalui survey dengan cara menerbitkan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan indikator penelitian.

Selain itu, pengumpulan data dilakukan juga dengan studi dokumen yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Data

#### 4.1.1. Evaluasi Model Struktural

Evaluasi model struktural (inner model) bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel dengan melihat seberapa besar varians yang dapat dijelaskan dan mengetahui nilai P yang signifikan (Hair, Hult, M, Ringle, & Sarstedt, 2014). Dengan demikian melalui evaluasi model struktural dapat menjawab pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis 1, 2 dan 3, 4. Sedangkan untuk hipotesis 5 (pengaruh mediasi) akan diuji melalui pengujian mediasi pada analisis selanjutnya.

Tabel 1 Struktural Goodnes of Fit Model

Kriteria	Parameter
Average path coefficient (APC)	0.378/ P<0.001

Average R-squared (ARS)	0.668/ P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)	0.666/ P<0.001
Average block VIF (AVIF)	5.161
Average full collinearity VIF (AFVIF)	2.590
Tenenhaus GoF (GoF)	0.695
Sympson's paradox ratio (SPR)	1.000
R-squared contribution ratio (RSCR)	1.000
Statistical suppression ratio (SSR)	1.000

Sumber: Pengolahan data WarpPLS 6.0 2020

Berdasarkan Tabel 1. di atas terlihat bahwa model penelitian ini memiliki kesesuaian yang baik, dimana nilai P untuk APC <0,001, ARS dan AAR <0,001, dengan nilai APC = 0,378, nilai ARS = 0,668 dan nilai AARS = 0,666. Begitu juga dengan nilai AVIF dan AFVIF yang dihasilkan adalah <3,3 yang berarti tidak ada masalah multikolonieritas antar indikator dan antar variabel eksogen. GoF yang dihasilkan adalah 0.695 > 0.1 yang berarti model yang sesuai sangat baik. Untuk SPR dan RSCR menghasilkan nilai sama dengan 1 sedangkan SSR dengan nilai 1.000 > 0.7 yang berarti tidak ada masalah kausalitas dalam model.

#### 4.1.2. Pengujian Model Keseluruhan

Tabel 2. Hasil koefisien jalur dan P-Value

HG "O U O G	2 0 3 ; ;	> 2 0 2 2 3
E R "O U O G	2 0 7 4 5	> 2 0 2 2 3
HG "I F	2 0 3 4 4	2 0 2 3 5
E R "I F	2 0 3 ; ;	> 2 0 2 2 3
I F " "	2 0 6 ; 6	> 2 0 2 2 3
O U O G u		

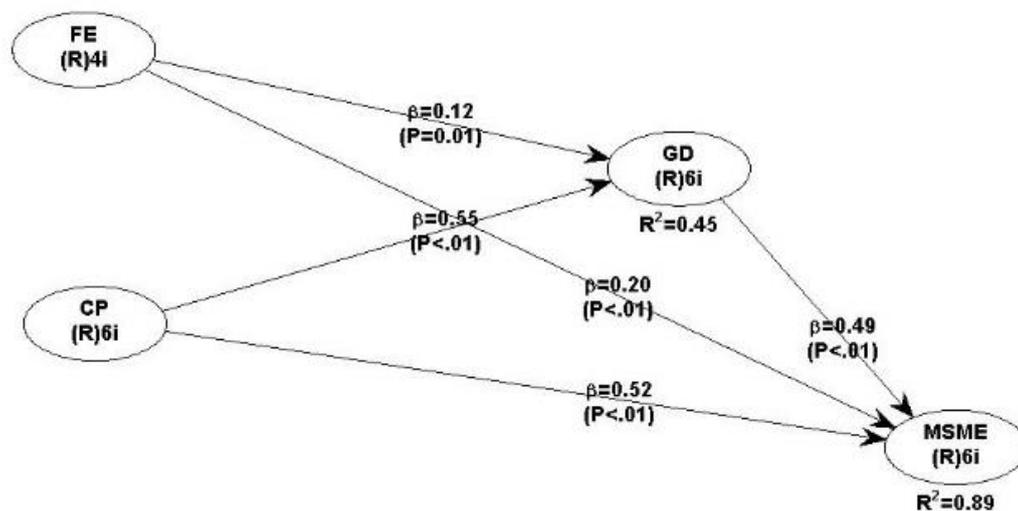
Sumber: Pengolahan data WarpPLS 6.0 2020

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pendidikan keuangan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 0,199 dan p-value <0,001, sehingga hipotesis pertama diterima. Untuk pengujian hipotesis kedua yaitu perlindungan pelanggan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM dengan nilai koefisien 0,523 dan p-value <0,001 sesuai dengan hipotesis sehingga hipotesis ini diterima.

Selanjutnya hipotesis ketiga yaitu dimensi pemerintah dapat memediasi pengaruh pendidikan keuangan terhadap pemberdayaan UMKM, dengan nilai koefisien 0,122 dan p-value 0,013 maka hipotesis ketiga ini diterima.

Hipotesis keempat adalah dimensi pemerintah dapat memediasi pengaruh perlindungan pelanggan terhadap pemberdayaan UMKM, dimana nilai koefisiennya 0,199 dan p-value <0,001, hipotesis ini diterima.

Kemudian hipotesis kelima dimensi pemerintah berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM dengan nilai koefisien 0,494 dan p-value <0,001, maka hipotesis ini diterima.



Gambar 2 Model Riset Keseluruhan

#### 4.1.3. Pengujian Efek Mediasi

Menurut Baron dan Kenny (1986) dalam model analisis yang memanfaatkan variabel mediasi dapat diketahui apakah terdapat mediasi penuh atau mediasi parsial. Mediasi penuh adalah saat variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen ketika tidak ada mediator. Sedangkan mediasi parsial adalah ketika variabel independen dapat secara langsung mempengaruhi variabel dependen tanpa melibatkan variabel mediator. Selain itu, variabel mediasi terjadi karena variabel independen dapat memprediksi variabel dependen secara langsung, namun nilainya lebih kecil dari nilai prediksi variabel mediator. Dalam hal ini, jika koefisien variabel prediksi lebih besar dari koefisien variabel mediasi terhadap variabel dependen, maka tidak boleh disebut sebagai mediator. Menguji pengaruh tidak langsung dan pengaruh total untuk mengetahui nilai koefisien hubungan tidak langsung. Dalam penelitian ini mengikuti prosedur sebagai formulasi dan tahapan pengujian mediasi yang dikemukakan oleh (Baron dan Kenny, 1986).

Tabel 3 Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total

<b>Indirect Effect</b>	<b>Path Coeffisien</b>	<b>P-Value</b>
HG I F O U C	0.060	0.062
ER I F O U C	0.274	<0.001
<b>Total Effect</b>	<b>Path Coeffisien</b>	<b>P-Value</b>
HG O U O G u	0.259	0.013
ER O U O G u	0.797	<0.001
I F " O U O G u	0.494	<0.001

Sumber: Pengolahan data WarpPLS 6.0 2020

Berdasarkan hasil pengujian efek mediasi pada tabel di atas koefisien pengaruh v k f c m " n c p i u w p i " w p v w m " r g p i w l k c p " HG " " I F " " dengan p-value 0,062 (p <10%). Hasil tersebut menjelaskan bahwa nilai GD mampu memediasi secara signifikan pengaruh edukasi keuangan terhadap pemberdayaan UMKM.

F c n c o " r g p i w l k c p " j w d w p i c p " l c n w t " l " l c n w t " r 0,259. Sedangkan jalur hubungan langsw p i p { c " c f c n c j " ER " " I F " " W D g i k v w " l w i c " l c n w t " m q p g m u k " n c p d i s i m p u l k a n b a h w F " " W O M terdapat mediasi parsial dalam pendidikan keuangan (FE) terhadap pemberdayaan UMKM melalui dimensi pemerintah sebagai variabel mediasi parsial.

## 4.2. Pembahasan

Edukasi keuangan terkait positif dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Hasil pengujian dengan nilai koefisien 0,199 dan p-value  $<0,001$ , maka hipotesis pertama diterima. Perlindungan konsumen terkait positif dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Hasil pengujian dengan nilai koefisien 0,523 dan p-value  $<0,001$ , maka hipotesis kedua diterima. Hasil ini sejalan dengan (Guntur & Zainal, 2019) yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan salah satu hal terpenting, agar proses pemberdayaan UMKM berjalan efektif.

Teori keuangan perilaku menyatakan bahwa bagaimana fenomena psikologis seseorang mempengaruhi perilaku keuangannya. Dimensi pemerintah dapat memediasi pengaruh pemberdayaan UMKM pendidikan keuangan di Indonesia. Hasil pengujian dengan nilai koefisien 0,122 dan p-value 0,013 diperoleh hasil signifikan sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan (Ardiansyah, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen, komunikasi, dan dukungan antar stakeholders memegang peranan penting dalam pemberdayaan UMKM. Teori *pecking order* menyatakan bahwa mempertimbangkan biaya modal yang timbul dari jenis-jenis pendanaan dalam menentukan pilihan struktur modal suatu perusahaan. Dimensi pemerintah dapat memediasi pengaruh perlindungan konsumen terkait secara positif dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Hasil pengujian dengan nilai koefisien 0,199 dan p-value  $<0,001$  hasilnya signifikan, sehingga hipotesis keempat diterima.

Teori kewirausahaan menyatakan bahwa kewirausahaan memiliki ciri-ciri seperti keberanian menghadapi risiko, adanya energi dan semangat untuk beraktivitas, tanggung jawab, individu, antisipasi peluang masa depan, dan kemampuan berorganisasi.

Dimensi pemerintah berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia. Hasil pengujian dengan nilai koefisien 0,72 dan p-value  $<0,001$  hasilnya signifikan sehingga hipotesis keempat diterima (Guntur & Zainal, 2019).

## 5.1 Kesimpulan

Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk dan layanan keuangan yang ada di pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman tentang manajemen risiko. Lebih lanjut perlindungan konsumen bertujuan agar masyarakat memiliki rasa aman yang terjamin

dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh lima pilar pembiayaan inklusif terhadap pemberdayaan UMKM dan pengaruh kondisi kelembagaan terhadap pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa edukasi keuangan dan perlindungan nasabah merupakan hal terpenting dalam mewujudkan keuangan inklusif, agar sistem perekonomian berjalan dengan baik. Sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM menciptakan inklusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran:

1. Kepada pemerintah melalui Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk mengembangkan dan mendukung penguatan teknologi perbankan supaya layanan bisa diakses keseluruh nusantara. Hal ini mengingat Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau, dan keterbatasan bank untuk membuka cabang di setiap pulau tersebut. Karena pemerataan keadilan ekonomi tidak bisa tercapai jika Lembaga keuangan tidak tersebar ke seluruh nusantara.
2. Untuk pengembangan riset, dapat diteliti suatu pola riset lain yang berhubungan dengan keuangan inklusif ini agar dana masyarakat yang tidak masuk ke perbankan bisa dimanfaatkan untuk modal pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, A. (2019). Empowerment Strategies of Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs) to Improve Indonesia Export Performance. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2(4), 50–60. doi:10.29040/ijebar.v2i0
- Ardiansyah, M. (2016). Development Models and Strategy of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in South Sulawesi. *International Conference of Integrated Microfinance Management (IMM-16)*, (pp. 175–180). doi:10.2991/imm-16.2016.27
- Bank, W. (2010). *Inclusive Financing Survey*. Washington, D.C: World Bank. Retrieved October 10, 2017, from <https://data.worldbank.org/>
- Denis, D. J. (2004). Entrepreneurial finance: An overview of the issues and evidence. . *Journal of Corporate Finance*, 10(2), 301–326. doi:10.1016/S0929-1199(03)00059-2
- Gnan, E., Silgoner, M. A., & Weber, B. (2007). Economic and Financial Education: Concepts, Goals and Measurement. *Monetary Policy & the Economy*(3), 28-49.
- Guntur, M., & Zainal, H. (2019). Empowerment of Micro Business in the Department of Trade, Industry, Cooperative and Small and Medium Enterprises. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 227(02), 454–457. doi:10.2991/icamr-18.2019.109
- Hair, J., Hult, G., M, T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling*.
- Indonesia, B. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Bank Indonesia.
- Kuratko, D. (2004). Entrepreneurship education in the 21. *USASBE National Conference*, 1(5), (pp. 1–16).
- Mardanugraha, E., Anastasya, A., & Andi, M. (2015). Optimal Financing System For Indonesian SMEs. APEN. *CONFERENCE ON ASIA-AFRICA AERIAL AND OPTICAL SILK ROAD*, 11-12 November, pp. 11–12. Bandung.
- Mitter, C., & Kraus, S. (2011). Entrepreneurial finance - Issues and evidence, revisited. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 14(2–3), 132–150. doi: <https://doi.org/10.1504/IJEIM.2011.041728>
- OECD. (2005). *Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2005 : Corporate Responsibility in the Developing World*. OECD.
- Shinozaki, S. (2012). *A New Regime of SME Finance in Emerging Asia: Empowering Growth-Oriented SMEs to Build Resilient National Economies*. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10419/109602%0AStand>
- Statistik, B. P. (2011). Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yazdipour, R. (2011, July). *Advances in Entrepreneurial finance: With applications from behavioral finance and economics*. doi:10.1007/978-1-4419-7527-0